

ABSTRAK

Partai politik memiliki fungsi untuk melaksanakan rekrutmen politik. Rekrutmen politik dapat diartikan sebagai mekanisme pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Adanya ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu 2019 membuat partai dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif harus memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat terjun ke ranah politik untuk menjadi calon legislatif perempuan yang diusulkan oleh partai.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimana Pola Rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemenuhan Kebijakan *Affirmative Action* Pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di DPC PPP Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data memakai teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan teori rekrutmen politik Pippa Norris, serta didukung oleh teori gender dan politik untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam melaksanakan rekrutmen politik calon legislatif, DPC PPP menggunakan model sertifikasi dan nominasi sesuai dengan model rekrutmen Pippa Norris, meskipun terdapat beberapa perbedaan. Dalam proses rekrutmen caleg, DPC PPP Kota Tasikmalaya membentuk tim independen atau disebut Laznah Pemenangan Pemilu (LP2) yang bertugas untuk melaksanakan rekrutmen politik dengan menggunakan sistem rekrutmen terbuka dan tertutup. Rekrutmen calon legislatif yang dilaksanakan oleh DPC PPP Kota Tasikmalaya terdiri dari 3 tahapan penting yaitu penjangkaran caleg, penyaringan caleg, dan penetapan caleg. Dalam proses penetapan atau nominasi caleg dilakukan oleh Lembaga Penetapan Calon yang didalamnya diketuai oleh Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya dengan persetujuan DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Untuk menjangkarkan atau merekrut perempuan, DPC PPP Kota Tasikmalaya memiliki pola rekrutmen caleg perempuan dengan memaksimalkan ketentuan 30% perempuan, dengan merekrut kader atau simpatisan partai yang berpotensi menjadi caleg dan berpotensi memenangkan pemilu, kader perempuan direkrut dari rekomendasi badan otonom yang dimiliki PPP diantaranya WPP, Srikandi AMK, Srikandi GPK dengan melihat background dan kualitas caleg.

kata kunci: rekrutmen politik, caleg perempuan, partai politik, *affirmative action*.